

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik adalah jenis organisasi nirlaba dengan tujuan menyediakan lebih banyak layanan kepada masyarakat umum. Seiring bertambahnya kesadaran publik mengenai pentingnya tata kelola administrasi yang efisien, perhatian terhadap organisasi semacam ini juga semakin meningkat. Namun, organisasi publik sering kali dikritik karena dinilai tidak optimal dalam pemanfaatan sumber daya, serta rawan terhadap kebocoran anggaran dan kerugian. Salah satu bentuk sektor publik yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pembangunan masyarakat adalah pemerintah desa (Hadaryen & Sugiartono, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki peran langsung dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang dimana sebagai titik awal dalam pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya kecerdasan dan kesadaran masyarakat, mereka semakin menuntut agar lembaga publik menjalankan prinsip transparansi dan bertanggung jawab terhadap publik (Hadaryen & Sugiartono, 2021). Akuntabilitas pemerintah desa adalah tolak ukur untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tanggungjawabnya (Kenanga & Musmini, 2024). Oleh karena itu, dengan adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas, organisasi

pemerintah harus dapat mengukur kinerjanya sesuai dengan standar-standar tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di sektor publik merupakan elemen yang krusial untuk diperhatikan. Anggaran di sektor ini berfungsi sebagai perencanaan keuangan yang dirancang secara terstruktur dan tertulis dalam bentuk angka-angka keuangan. Dokumen anggaran publik menjadi alat penting dalam mengevaluasi kondisi finansial organisasi, mencakup penerimaan, pengeluaran, serta berbagai aktivitas operasional (Magfiroh, 2020). Pemerintah desa perlu memperhatikan pengelolaan anggaran desa secara transparan melalui laporan keuangan yang disusun, agar setiap kebijakan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa dan mendukung kepentingan publik secara menyeluruh.

Desa, yang juga sering disebut sebagai desa adat, merupakan komunitas hukum yang berada dalam batas wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan sendiri. Entitas ini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal berdasarkan Prakarsa waga, hak-hak historis, atau nilai-nilai tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia (Seran, 2021). Pemerintah desa memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya nasional secara merata, serta memastikan adanya keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan APBDes dijalankan sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan demi mendukung kesejahteraan warga desa. Desa memperoleh berbagai sumber pendapatan yang harus dikelola secara bijaksana dan transparan sesuai yang tercantum dalam APBDes (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Dokumen perencanaan keuangan tahunan di tingkat desa, yang dikenal sebagai APBDes, dirancang melalui kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD, kemudian dilegalisasi melalui peraturan desa (Agung Gede Swadana Kumara Putra & Sri Pancawati, 2023). APBDes memuat komponen seperti pemasukan, pengeluaran dan pembiayaan, yang mencerminkan bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan dan aktivitas desa, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat (Idrika et al., 2023). Dana desa digunakan sebagai sumber pendanaan untuk berbagai program yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan taraf hidup, serta upaya pengentasan kemiskinan (Resmiani & Diatmika, 2022). Oleh karena itu, pemerintah desa wajib menunjukkan kinerja yang transparan dan bertanggung jawab dengan menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjalankan program secara efektif dan tepat sasaran.

Penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dapat dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai salah satu alat ukur dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Agung Gede Swadana Kumara Putra & Sri Pancawati, 2023). Penilaian kinerja diperlukan untuk meningkatkan pencapaian keberhasilan pelayanan publik dimasa mendatang. Dalam sektor publik, sistem penilaian kinerja kinerja yang baik menjadi komponen penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan misi organisasi. Pengukuran kinerja di sektor publik berperan dalam mengevaluasi tingkat akuntabilitas lembaga publik (Dewi & Werastuti, 2024). Akuntabilitas sektor publik mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pegawai negeri dalam menjalankan tugas utama dan fungsinya (Purnamawati & Rahayu, 2025). Akuntabilitas tidak hanya berfokus pada penilaian

terhadap bagaimana pengelolaan anggaran publik, tetapi juga menyentuh aspek bagaimana penggunaan dana publik dapat dilakukan melalui pendekatan *value for money*, yang mencakup unsur penggunaan sumber daya yang hemat (ekonomi), pengelolaan yang optimal (efisiensi), dan pencapaian tujuan secara maksimal (efektivitas) (Magfiroh, 2020).

Mardiasmo (2018), menjelaskan bahwa dalam pengelolaan organisasi sektor publik, konsep *value for money* didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Prinsip ekonomi berfokus pada pengadaan sumber daya dengan biaya serendah mungkin, namun tetap mempertahankan mutu hasil yang diharapkan. Secara umum, ekonomi dapat diukur melalui rasio antara *input* dengan nilai *input* dalam bentuk rupiah. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan pencapaian *output* yang maksimal dengan pemanfaatan *input* seminimal mungkin, sesuai dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari pemborosan sumber daya. Terakhir, efektivitas menggambarkan sejauh mana hasil yang dicapai (*outcome*) sesuai dengan *output* yang telah direncanakan, atau dalam kata lain, sejauh mana tujuan organisasi berhasil diwujudkan.

Pengelolaan keuangan yang efektif dalam organisasi sektor publik, apabila dijalankan dengan sistem kinerja yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian tujuan, akan memudahkan organisasi dalam mencapai hasil yang diharapkan serta meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki. Konsep *value for money* tercapai ketika pengeluaran (*input*) dapat ditekan serendah mungkin untuk menghasilkan hasil kerja (*output*) yang maksimal dalam upaya mencapai sasaran organisasi (Magfiroh, 2020). Pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan pemerintah

dalam mengimplementasikan kebijakan dan program secara tepat. Oleh karena itu, *value for money* dapat dijadikan landasan dalam mengevaluasi kinerja, khususnya dalam pelaporan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan melalui pendekatan *value for money* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Salah satunya (Sholikhah & Khoiriawati, 2022), yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan studi kasus untuk menilai kinerja keuangan Desa Pucangsimo berdasarkan Laporan Realisasi APBDes. Hasil analisis *value for money* menunjukkan bahwa dalam aspek ekonomi, selama periode 2017 hingga 2021, pemerintah desa telah melakukan pengelolaan keuangan secara hemat. Dari sisi efisiensi, tahun 2018 dan 2019 tergolong efisien, namun tahun 2017, 2020, dan 2021 dinilai tidak efisien. Sementara itu, efektivitas pengelolaan keuangan desa masuk kategori efektif pada tahun 2017 hingga 2019 dan cukup efektif pada tahun 2020 dan 2021.

Penelitian terkait dilakukan oleh (Agoes Hari Edy Wibowo et al., 2023) mengkaji kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan analisis *value for money* melalui pendekatan kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis *value for money*, aspek ekonomis pada periode tahun 2019-2022 berada pada kategori ekonomis diartikan bahwa pemerintah desa mampu mengatur anggaran. Untuk aspek efisiensi pada tahun 2019 hingga 2022 masuk kategori efisien dengan rata-rata persentase 90% hingga 99% meskipun pada tahun 2020 tercatat tidak efisien karena realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan. Sedangkan dari sisi efektivitas selama periode tahun 2019-2022 termasuk kategori cukup efektif, yang berarti pelayanan yang diberikan sudah cukup memenuhi tujuan yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kandida Agatha Dua, 2023), menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis *Value For Money* dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. Dari aspek ekonomi, pada tahun 2018 kinerja tergolong cukup ekonomis dengan persentase 86,51%, sementara pada periode 2019 hingga 2021 kinerja masuk kategori ekonomi dengan persentase antara 85% hingga 99% yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif untuk mencapai program dan kegiatan. Dari segi efisiensi, tahun 2018 termasuk sangat efisien dengan persentase dibawah 90%, diikuti tahun 2019 yang efisien dengan 97,42%. Namun pada tahun 2020 dinilai tidak efisien karena realisasi belanja lebih rendah daripada pendapatan, lalu kembali efisien pada tahun 2021 dengan persentase 90-99%. Segi efektivitas, kinerja Pemerintah Desa Ribang relatif stabil antara tahun 2018 sampai 2021 dengan rata-rata persentase sebesar 98,15%, menandakan realisasi anggaran yang maksimal.

Penelitian terkait lainnya juga dilakukan oleh (Tinambunan et al., 2023), dengan metode kuantitatif untuk menganalisis kinerja pengelolaan dana desa berdasarkan *value for money* di Desa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari sisi ekonomi, kinerja keuangan pemerintah desa selama tahun 2019 hingga 2021 masuk dalam kategori ekonomis dengan persentase di atas 100%. Pada aspek efisiensi, tahun 2020 dikategorikan tidak efisien karena persentase melebihi 100%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 dinilai cukup efisien. Sedangkan untuk efektivitas, kinerja pemerintah desa pada periode tersebut tergolong efektif, yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya menunjukkan kesamaan dalam fokus kinerja keuangan pemerintah desa. Beberapa hasil penelitian

menunjukkan perbedaan meskipun menggunakan variable yang sama tetapi dengan objek, tahun, dan metode yang digunakan berbeda sehingga menyebabkan hasil penelitian bervariasi. Situasi ini memotivasi peneliti untuk menguji kembali penilaian kinerja keuangan melalui pendekatan *value for money* pada wilayah pemerintahan yang berbeda.

Penelitian ini mengadopsi dan mengembangkan penelitian dari (Tinambunan et al., 2023) dengan kebaruan pada landasan teori dan tahun penelitian yang dimana penelitian terdahulu menggunakan periode 3 tahun sedangkan peneliti menggunakan periode 5 tahun yaitu dari tahun 2020-2024. Selain itu, kebaruan juga terletak pada metode penelitian serta lokasi penelitian yang dipilih yakni Desa Telaga Kecamatan Busungbiu.

Desa Telaga merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Secara geografis, Desa Telaga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Busungbiu. Desa Telaga mempunyai 2 dusun, 1 adat dan jumlah penduduk ± 1.500 jiwa. Luas wilayah Desa Telaga tidak terlalu besar seperti desa-desa lain di kecamatan tersebut di angka 834 Ha. Namun, dengan ukuran wilayah yang tidak terlalu besar menjadi keuntungan bagi Pemerintah Desa Telaga dalam memperhatikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki (Desa Telaga, 2018).

Peneliti bermaksud untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai alat evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga melalui pendekatan *value for money* yang mencakup tiga aspek utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Fokus penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBDes yang disusun oleh Pemerintah Desa Telaga selama periode 2020 hingga 2024. Realisasi APBDes pada Desa Telaga yang terletak di Kecamatan Busungbiu,

menjadi objek utama dalam penelitian ini. Berikut adalah rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Telaga.

**Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Telaga
Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	Rp 1.642.781.000,00	Rp 1.605.689.335,95	97,74
2021	Rp 1.752.371.000,00	Rp 1.696.988.306,59	96,83
2022	Rp 1.813.467.300,00	Rp 1.744.780.884,64	96,21
2023	Rp 1.918.570.010,73	Rp 1.858.013.131,69	96,84
2024	Rp 2.690.737.247,99	Rp 1.943.945.337,34	72,24

Sumber: Pemerintah Desa Telaga (2025)

**Tabel 1. 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Telaga
Tahun 2020-2024**

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	Rp 2.170.900.735,74	Rp 1.864.697.766,00	85,89
2021	Rp 2.021.477.305,69	Rp 1.651.431.219,00	81,69
2022	Rp 2.123.130.693,28	Rp 1.858.750.315,00	87,54
2023	Rp 2.114.263.973,65	Rp 1.654.521.107,00	78,25
2024	Rp 3.089.923.235,60	Rp 1.973.627.170,00	63,87

Sumber: Pemerintah Desa Telaga (2025)

Dari analisis pada tabel 1.1 dan 1.2, terlihat bahwa pendapatan dan belanja Desa Telaga menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pendapatan terealisasi sebesar 97,74%, sedangkan belanja terealisasi lebih rendah di angka 85,89%. Pada tahun 2021, pendapatan mengalami sedikit penurunan dengan realisasi sebesar 96,83%, sementara belanja mengalami penurunan lebih

besar menjadi 81,69%. Pada tahun 2022, pendapatan kembali mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 96,21% namun belanja justru meningkat menjadi 87,54%. Pada tahun 2023, pendapatan kembali meningkat dengan realisasi 96,84%, tetapi belanja mengalami penurunan yang signifikan menjadi 78,25%. Terakhir pada tahun 2024, pendapatan menunjukkan penurunan yang cukup besar menjadi 72,24% sementara belanja juga tercatat lebih rendah dari anggaran dengan realisasi sebesar 63,87%.

Fenomena fluktuasi anggaran yang terjadi, khususnya terkait dengan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat bahwa anggaran belanja lebih tinggi daripada pendapatan yang tercatat dalam APBDes. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran. Meski SiLPA sering digunakan sebagai alternatif pendanaan, fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Setelah dilakukan wawancara dengan informan Bapak Made Hendra Mahayuda sebagai Kepala Desa Desa Telaga, didapatkan informasi sebagai berikut:

Defisit itu terjadi karena keterbatasan dari segi waktu dan dari segi kegiatan yang kami tidak bisa tebak kapan terjadinya contohnya seperti bencana alam. Namun defisit dalam anggaran desa ini nanti akan masuk dan ditetapkan di SiLPA jadi nanti di SiLPA bisa digunakan untuk kegiatan di tahun berikutnya. Tetapi jika melihat dari capaian output itu sudah namun di SiLPA besar karena kendala di waktu serta di tahun 2023 kami dapat dana afirmasi khususnya di Desa Telaga dengan nominal Rp140.000.000 anggaran itu keluar di akhir bulan November jadi kami tidak bisa merealisasikan sehingga pada akhirnya itu kami SiLPAkan dulu baru di tahun berikutnya kita eksekusi. Kemudian di tahun 2024 itu banyak kegiatan politik seperti Pilpres dan Pilgub jadi waktu-waktu melaksanakan kegiatan banyak yang terpotong karena hal tersebut.

Realisasi APBDes Desa Telaga pada tahun 2020-2024 masih belum mencapai target, dimana jumlah anggaran dan realisasi mengalami kelebihan. Hal ini terjadi karena beberapa anggaran yang telah direncanakan tidak bisa diprediksi kegiatannya serta ada anggaran afirmasi yang keluar di akhir tahun sehingga pemerintah desa tidak bisa merealisasikannya dan pada akhirnya di SiLPAn untuk tahun berikutnya. Selain itu situasi PAGU yang tidak sesuai dengan harapan yang keluar sehingga adanya keterlambatan dalam menginput realisasi anggarannya. Hal ini juga menyebabkan pemerintah desa harus terus bekerja agar bisa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan dengan menggunakan hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Telaga. Meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, namun realisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan menandakan bahwa pemanfaatan dana desa belum optimal. Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan, baik dari segi ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Pengukuran *Value For Money* Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menilai sejauh mana konsep *Value for Money* diterapkan dalam pengelolaan anggaran di tingkat desa, khususnya pada APBDes Pemerintah Desa Telaga sehingga dapat diketahui bagaimana efisiensi,

efektivitas dan ekonomi dalam penggunaan anggaran bisa berkontribusi pada kinerja keuangan desa. Dalam konteks literatur akademik, tujuan penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman dan kontribusi teori terkait *Value for Money* dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas serta memberikan kontribusi dalam penilaian kinerja keuangan di sektor publik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Pendapatan dan belanja Desa Telaga mengalami fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya.
2. Pada beberapa tahun, anggaran belanja Desa Telaga melebihi anggaran pendapatan, hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembiayaan dari SiLPA yang diharapkan akan diterima pada tahun berikutnya.
3. Adanya anggaran afirmasi yang keluar diakhir tahun sehingga tidak bisa langsung direalisasikan.
4. Batas pengeluaran (PAGU) yang tidak sesuai harapan yang keluar sehingga harus lebih bekerja agar bisa menyesuaikan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tetap terfokus dan tidak melebar, penulis memusatkan penelitian ini pada Analisis Pengukuran *Value For Money* Pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemetintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengukuran *Value For Money* dari segi ekonomi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengukuran *Value For Money* dari segi efisiensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengukuran *Value For Money* dari segi efektivitas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2024?
4. Bagaimana strategi atau upaya yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menilai *Value For Money* dari aspek ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai ukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng periode 2020-2024.
2. Mengkaji *Value For Money* dari sisi efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng selama tahun 2020-2024.
3. Menganalisis *Value For Money* dari aspek efektivitas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka penilaian kinerja keuangan Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui strategi apa saja yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna dalam memperdalam ilmu pengetahuan serta memperluas pemahaman mengenai pengukuran *value for money* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti terkait dengan pengukuran *value for money* pada APBDes dalam rangka evaluasi kinerja keuangan pemerintah desa.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi di perpustakaan universitas dan menjadi sumber informasi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang akuntansi sektor publik, khususnya pengukuran *value for money*.

c) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran lebih ekonomis, efisien dan efektif.

